



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)

TAHUN 2025 - 2029

Prepared By

**KECAMATAN
KARANGREJO**



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kecamatan Karangrejo Tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029, dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan tahun 2025- 2029 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Magetan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Magetan.

Karangrejo, 18 Desember 2025
CAMAT KARANGREJO

SECONDANY BUDI W,S.Sos,MM
Pembina Tk.I/(IV/b)
NIP 197011021990031002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAH DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	20
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	31
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	32
2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah	32
2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	32
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	33
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
2.2.2 Isu Strategis	33
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029	39
3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	41
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	41
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
4.1. Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan Perangkat Daerah hasil <i>Cascading</i> dari Tujuan, Sasaran, <i>Outcome</i> dan <i>Output</i>	43
4.2. Program kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur	65
4.3 Sub-kegiatan dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	96
4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	97
4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	102
BAB V PENUTUP	103

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 – 5 Tahun. Sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Didalam Renstra digambarkan tujuan , sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan . Perencanaan strategi juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan mempertimbangkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Perencanaan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan di arahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan Visi, Misi dan arah Pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, Penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan zona integritas di Kecamatan Karangrejo yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Karangrejo Pemerintah Kabupaten Magetan mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategi dan komprehensif sehingga sepenuhnya pencapaian mengarah kepada Visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Karangrejo dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Secara Umum Rencana Strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan: (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

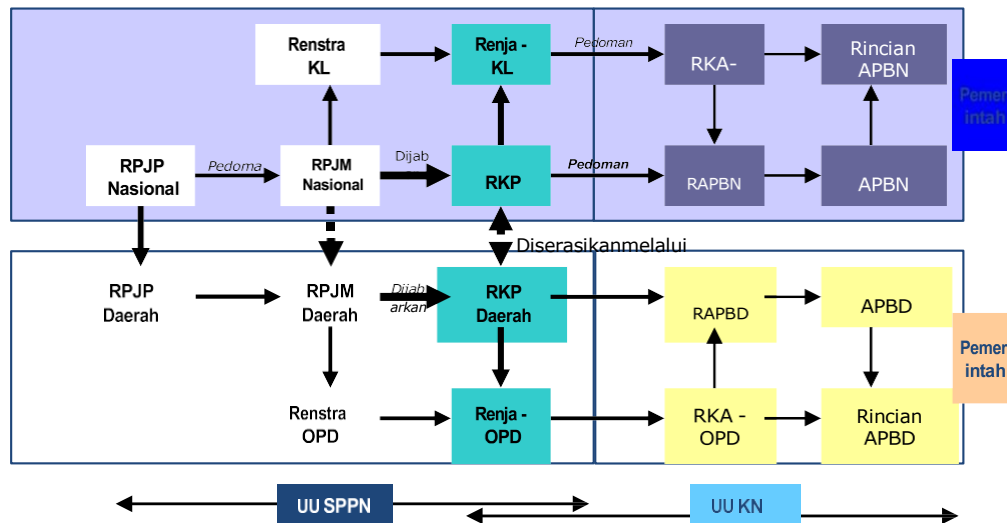
Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rencana awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir

Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam system perencanaan pembangunan dan system keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Karangrejo yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magetan dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangrejo. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karangrejo dalam mendukung visi, misi , tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun

- 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045.
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
 17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016

- tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Magetan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2025–2045.
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 06 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2024–2044.
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya dokumen Renstra ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas /program /kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban;
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat;

Berdasarkan maksud di atas maka tujuan disusunnya dokumen Renstra ini sebagai berikut:

- a. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Karangrejo selama periode 5 (lima) tahun mendatang sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan.
- b. Pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan.
- c. Menjamin terciptanya konsistensi, sinergi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang	Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai dengan kaidah Penyusunan produk hukum
1.3	Maksud dan Tujuan	Berisi Tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
1.4	Sistematika Penulisan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		
2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah
2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	Penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya (mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit Usaha yang masih operasional)
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran /target

		Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya (SPM, SDG's, indikator yang telah di ratifikasi Pemerintah, dan indikator pelayanan perangkat Daerah lainnya)
2.1.4	Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	Berisi kelompok sasaran yang Mendapatkan pelayanan Perangkat Daerah
2.1.5	Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	Berisi uraian mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan
2.1.6	Dukungan BUMD dalam pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Berisi uraian dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja
2.1.7	Kerjasama Daerah yang Menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah	Berisi uraian Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang Mempengaruhinya.
2.2.2	Isu-isu Strategis Perangkat Daerah	Isu strategis yang akan ditangani Melalui Renstra Perangkat Daerah Tahun rencana

BAB III: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025- 2029	Menunjukkan keterkaitan dan konsistensi antar tujuan RPIMD periode berkenaan dengan tujuan Dan sasaran Perangkat Daerah
3.2	Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029	Rumusan pernyataan strategi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
3.3	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Rumusan pernyataan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
BAB IV: PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		
4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output	Berisi program, kegiatan dan sub-kegiatan Perangkat Daerah hasil <i>Cascading</i> dari Tujuan, Sasaran, <i>Outcome</i> dan <i>Output</i> dari pohon kinerja

4.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Mengacu pada Nomenklatur	Rencana program, kegiatan, sub-Kegiatan, kinerja, indikator kinerja, Dan pagu indikatif
4.3	Sub-kegiatan dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	Berisi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah.
4.4	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Berisi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah.
4.5	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Berisi target kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah
BAB V : PENUTUP		
Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah		

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan pemerintahan kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Dengan didasarkan pada ketentuan pasal 2 yang berbunyi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Karangrejo berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016. Kecamatan di bentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
- c) Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
- d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan;
- e) Pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
- f) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. CAMAT

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan ; dan
- j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas kesekretariatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a) Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b) Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c) Pengelolaan barang Inventaris dan perlengkapan;
- d) Pengelolaan urusan Kepegawaian;
- e) Pengelolaan urusan keuangan;
- f) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan ;
- g) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h) Pelaksanaan fasilitas penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;
- i) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik ; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Melaksanakan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain:

- a) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan ;
- b) Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian , cuti, kenaikan pangkat , pensiun;
- g) Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) Merencanakan pengelolaan arsip;
- j) Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik ;dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

d. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PEP

Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan, serta harta kekayaan asset kecamatan dan kelurahan, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub. Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk

- menyusun Rencana Kegiatan Anggaran ;
- b) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - c) Melaksanakan tata usaha keuangan;
 - d) Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
 - e) Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
 - f) Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
 - g) Menghimpun Peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
 - h) Menyusun laporan keuangan;
 - i) Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
 - j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
 - k) Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
 - l) Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENSTRA);
 - m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
 - n) Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
 - o) Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
 - p) Mengelola dokumentasi perjanjian kinerja;
 - q) Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Stándar Pelayanan (SP), Stándar Operasional Prosedur (SOP), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
 - r) Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
 - s) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

e. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa / kelurahan dan administrasi kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- c) Melaksanakan fasilitas rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- d) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;

- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f) Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan;
- g) Mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah Desa / Kelurahan;
- i) Melaksanakan Fasilitasi kegiatan dibidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j) Menyusun Evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan ; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan;
- c) Melaksanakan fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/kota-RPJMDDes;
- d) Memfasilitasi pelaksanaan tugas , fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- e) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f) Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- g) Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- i) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- j) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa dibidang pemberdayaan, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan;
- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat;
- m) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian;

- n) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;
- o) Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Desa /Kelurahan; dan
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan politik dalam negeri serta pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan program kerja dan anggaran seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b) Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah;
- c) Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);
- d) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- g) Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i) Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

h. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang Sosial Kemasyarakatan serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta

- masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
 - d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
 - e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;
 - f) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama;
 - g) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
 - h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan wadah organisasi kepemudaan;
 - i) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan dibidang olah raga dan wadah organisasi olah raga;
 - j) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;
 - k) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
 - l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

j. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Karangrejo ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

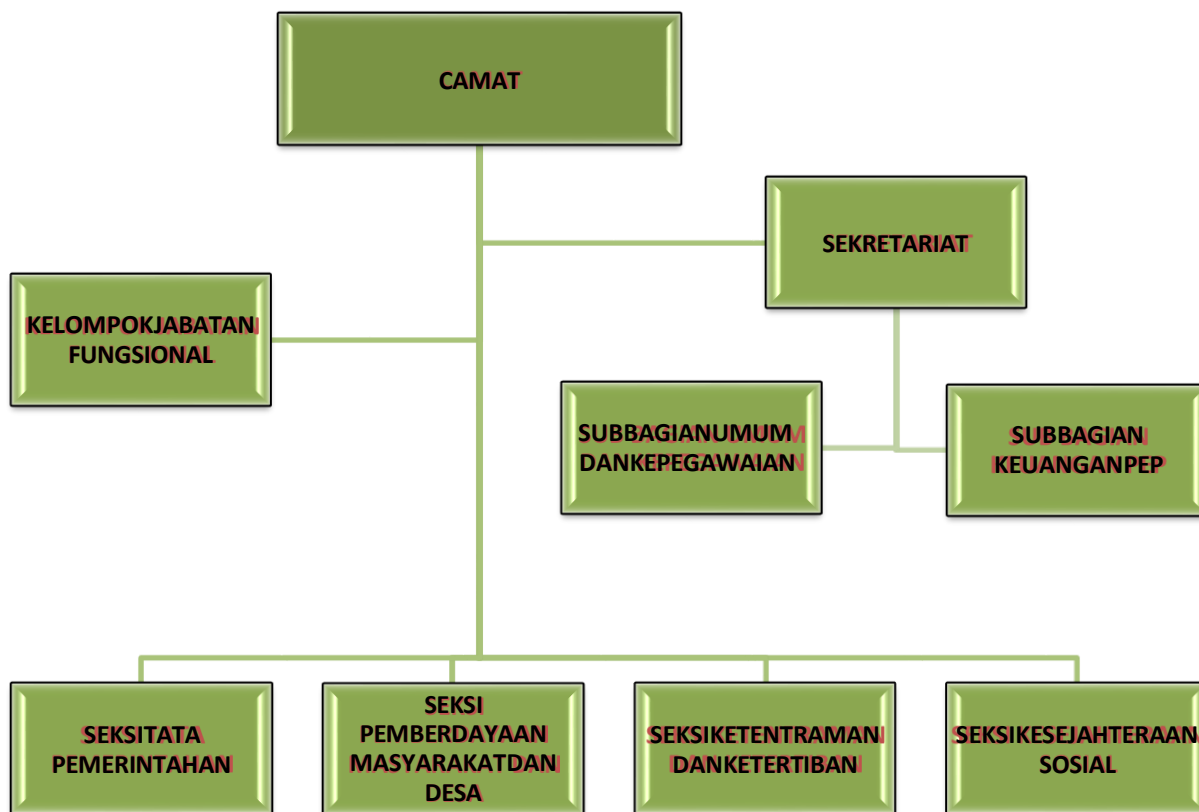
Struktur Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan PEP

Adapun Struktur Organisasi OPD Kecamatan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi OPD Kecamatan

KELURAHAN

1. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
 - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat
 - c. Melaksanakan pelayanan masyarakat
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum
 - e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan dan pembinaan sosial, ekonomi dan pembangunan
 - b. pelaksanaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
 - c. penyelenggaraan kegiatan kelembagaan di Kelurahan
 - d. pembinaan kepegawaian dilingkungan Kelurahan
 - e. perencanaan kegiatan dan anggaran kelurahan dalam rangka pelaksanaan APBD
 - f. pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab kelurahan dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan anggaran kegiatan kelurahan
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan serta memberikan pelayanan teknis dan sosial strative kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan
- c. mengkoordinasikan tugas-tugas dari seksi-seksi kelurahan;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha umum dan kepegawaian di lingkup kelurahan
- e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan aset /inventaris kelurahan
- f. melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan penyusunan program kelurahan
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- h. Menyediakan bahan dalam rangka rapat dinas kelurahan
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran kelurahan dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Kelurahan
- c. melaksanakan administrasi kependudukan Catatan Sipil;
- d. melaksanakan kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas dibidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU)
- f. melaksanakan fasilitasi dibidang pertanian/keagrariaan;
- g. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan serta penyusunan pelaporan program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban Umum.
- h. Melaksanakan kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- i. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa
- j. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya serta membantu pelaksanaan pengawasan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi pemberdayaan masyarakat
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam bidang perbankan dan perkreditan rakyat
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan perkoperasian, usaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan/usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian
- e. Melaksanakan pembinaan administratif pembangunan di kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan
- f. Melaksanakan kegiatan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
- g. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
- h. Melaksanakan penyusunan data administrasi perekonomian di kelurahan
- i. Melaksanakan dan pembinaan di bidang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan
- j. Melaksanakan Musrenbang di Kelurahan
- k. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
- l. Melaksanakan tugas Lain yang diberikan oleh Lurah.

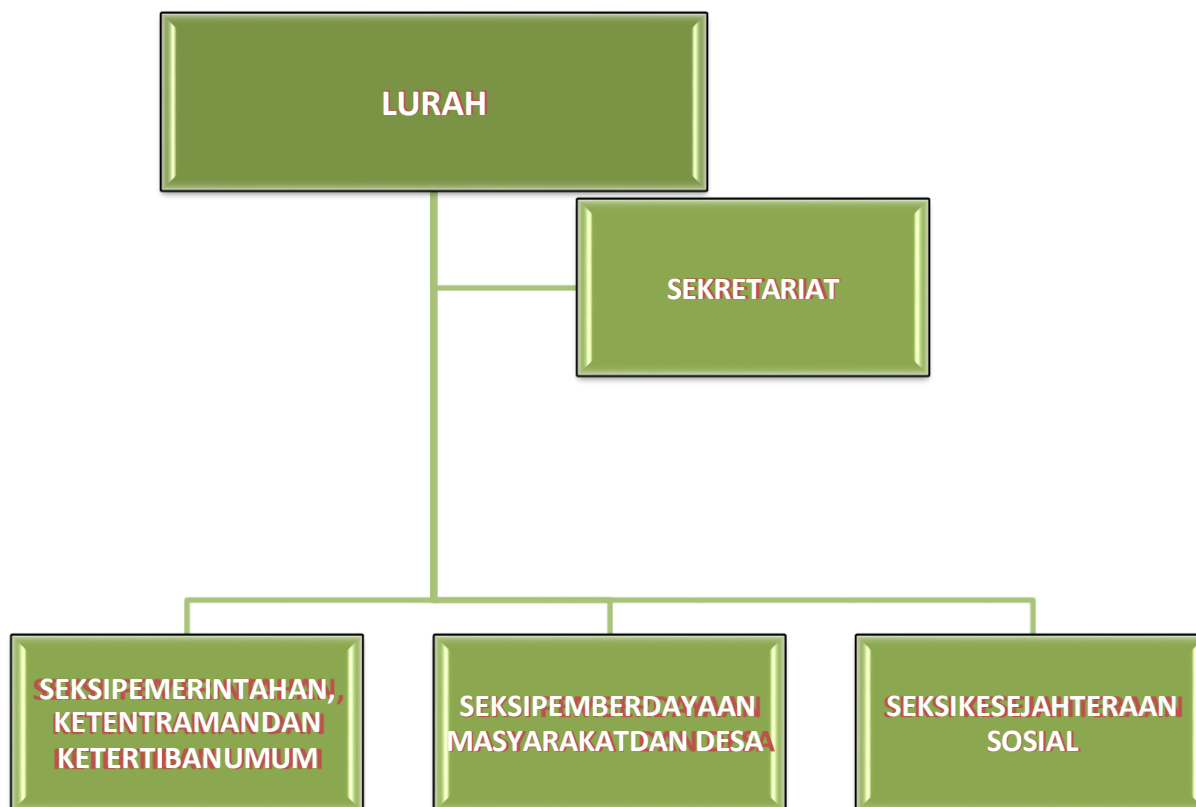
5. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi kesejahteraan sosial
- b. Melaksanakan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
- c. Melaksanakan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
- e. melaksanakan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- f. melaksanakan program dan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional dan Agama;
- g. melaksanakan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata
- h. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
- i. melaksanakan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga
- j. Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan dalam

- rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Adapun Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut



Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (ASN) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah ASN berdasarkan Status Pegawai

Tabel 2.1

Jumlah ASN Karangrejo Kab.Magetan berdasarkan Status Pegawai

No	Status Pegawai	Jumlah(orang)	
		Laki-Laki	Perempuan
1	PNS	10	7
2	PPPK	2	4
Jumlah		12	11

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Karangrejo Kab. Magetan

2. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.2

Jumlah ASN Kecamatan Karangrejo Kab. Magetan berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah(orang)	
		Laki-Laki	Perempuan
1	IV/e	0	0
2	IV/d	0	0
3	IV/c	0	0
4	IV/b	1	0
5	IV/a	0	0
6	III/d	4	2
7	III/c	2	1
8	III/b	1	1
9	III/a	1	0
10	II/d	1	2
11	II/c	0	1
12	II/b	0	0
13	II/a	0	0
14	I/d	0	0
15	I/c	0	0
16	I/b	0	0
17	I/a	0	0
18	V	2	4
Jumlah		23	

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Karangrejo Kab. Magetan

3. Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 2.3
Jumlah ASN Karangrejo Kab.Magetan berdasarkan
Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Camat	III.a	1	0
2	Sekretaris	III.b	0	0
3	Kepala Seksi	IV.a	2	1
4	Kepala Sub Bagian	IV.b	0	1
5	Lurah	IV.a	1	1
6	Sekretaris Kelurahan	IV.b	1	0
7	Kepala Seksi Kelurahan	-	2	0
8	Pengelola Administrasi Pemerintahan	-	1	0
9	Pengelola Kesejahteraan Sosial	-	0	1
10	Pengadministrasi Keuangan	-	1	0
11	Pengadministrasi Kepegawaian	-	0	1
12	Pengadministrasi Umum	-	1	2
13	Pengadministrasi Perkantoran	-	1	2
14	Operator Layanan Operasional	-	1	2
Jumlah			12	11

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Karangrejo Kab. Magetan

4. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.4
Jumlah ASN Kecamatan Karangrejo Kab.Magetan berdasarkan
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Strata 2(S2)	2	1
2	Strata 1 (S1)	4	1
3	Sarjana Muda(D3)	0	1
4	SLTA	5	8
5	SLTP	1	0
6	SD	0	0
Jumlah		12	11

Sumber: SubBag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Karangrejo Kab.Magetan

5. Jumlah ASN yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 2.5
Jumlah ASN Kecamatan Karangrejo yang Telah
Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah(orang)	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Diklatpim Tk.III	1	0
2	Adum/Adumla/DiklatpimTk.IV	2	2
Jumlah		5	

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Karangrejo Kab Magetan

Susunan Kepegawaian Yang ada pada Kecamatan
Karangrejo berdasarkan usia
Tabel 2.6
Jumlah SDM Berdasarkan Usia

No	Golongan	PNS		CPNS		PPPK		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Usia <30 Tahun	-	1	-	-	-	-	2	3	6
2	Usia 30-39 Tahun	-	-			-	3	2	1	6
3	Usia 40-49 Tahun	4	3	-	-	-	1	-	2	10
4	Usia ≥ 50 Tahun	6	3	-	-	2	-	2	-	13
Jumlah		10	7	-	-	2	4	6	6	35

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
Kecamatan Karangrejo Kab Magetan*

B. Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.7

Daftar Sarana dan Prasarana Kec.Karangrejo Kab.Magetan

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1.	Bangunan Kantor	m ²	4.880
2.	Kendaraan dinas roda4	unit	1
3.	Kendaraan roda2	Unit	5
4.	Mesin Kalkulator	Unit	1
5.	Lemari Besi/Metal	Unit	7
6.	Lemari Kayu	Unit	12
7.	Lemari Kaca	Unit	1
8.	Rak Besi/Metal	Unit	2
9.	Rak Kayu	Unit	1
10.	Filling Cabinet	Unit	4
11.	Brankas	Unit	1
12.	Meja Rapat	Unit	2
13.	Meja kerja eselonIII	Unit	2
14.	Meja Komputer	Unit	6
15.	Meja Kayu	Unit	18
16.	Kursi Besi/Metal	Unit	17
17.	Kursi Rapat	Unit	45
18.	Kursi Putar	Unit	13
19.	Kursi Tamu	Unit	3

20.	Bangku Tunggu Kayu	Unit	2
21.	Bangku Tunggu Besi	Unit	3
22.	Tangga Alumunium	Unit	1
23.	AC	Unit	9
24.	Kipas Angin	Unit	3
25.	Televisi	Unit	3
26.	LCD Proyektor	Unit	1
27.	Tripodsreen LCD Projector	Unit	2
28.	Laptop	Unit	7
29.	Hardisk	Unit	3
30.	Printer	Unit	8
31.	CPU	Unit	5
32.	Monitor	Unit	5
33.	Power Supply	Unit	4
34.	Pesawat Telepon	Unit	1
35.	Faximile	Unit	1
36.	Loker	Unit	1
37.	Scaner	Unit	1
38.	Speaker Portable	Unit	2
39.	Mesin Potong Rumput	Unit	1

*Sumber data: Pengurus Barang Kec.Karangrejo Kab Magetan
Th.2025*

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Karangrejo menunjukkan Kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan , ketepatan dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat.

Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan dan surat menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan system digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan public yang lebih responsive dan akuntabel.

Sub-bab ini membahas mengenai kinerja pelayanan perangkat daerah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan. Kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan salah satu aspek penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah terkait kepada masyarakat. Dalam proses penyusunan Renstra, evaluasi terhadap kinerja pelayanan ini sangat penting untuk mengidentifikasi capaian dan tantangan yang dihadapi oleh perangkat daerah. Oleh karena itu sub-bab ini akan menguraikan berbagai capaian indikator kinerja yang dilakukan

oleh Kecamatan Karangrejo upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Berikut ini adalah data capaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan tahun 2020-2024

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Karangrejo Kab. Magetan Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya (IKU)	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			✓	77,5	79	79,5	80	86	78,53	80,02	82,27	87,67	88,17	101,32	102,58	104,13	109	102
2	Kecamatan berpredikat kinerja baik			✓	-	61	65	70	-	-	65,6	65,6	82,35	-	-	107,54	100,92	117,6	-
3.	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan			✓	-	-	-	-	82,50	-	-	-	-	90,20	-	-	-	-	109,33
4.	Nilai SAKIP			✓	-	-	-	-	89	-	-	-	-	88,93	-	-	-	-	99,92

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 untuk urusan Kewilayahan berdasarkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan telah mencapai target, namun masih terdapat beberapa indikator yang capaiannya belum optimal. Penjelasan sebagaimana berikut ini :

1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari tahun 2020-2024 selalu mengalami kenaikan dikarenakan Pelayanan di Kecamatan Karangrejo dari tahun 2020 – 2024 semakin lama semakin membaik dan mengalami kemajuan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Karangrejo, di tahun 2024 mengalami kenaikan 0,5% dari tahun 2023 berdasarkan responden masyarakat bahwa survey kepuasan masyarakat mengalami kenaikan dari tahun 2020 .

Berdasarkan tabel tersebut, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan secara konsisten telah melaksanakan tugas Kewilayahan dengan melaksanakan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan masyarakat selama periode 2020–2024. Namun demikian, untuk pelaksanaan pelayanan (SKM) masih belum maksimal/optimal dengan capaian skor yang diperoleh.

Berdasarkan kinerja pelayanan yang ada, dapat diidentifikasi beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya aparatur pelayanan dalam melaksanakan prosedur pelayanan dikarenakan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas dikarenakan terbatasnya personil yang ada di Kecamatan.
2. Masih adanya kekosongan jabatan yang belum terpenuhi sehingga mengakibatkan kurang optimal tugas pokok dan fungsinya
3. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
4. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya.
5. Perkembangan Dana Desa dan Kelurahan yang semakin meningkat sehingga memerlukan Sumber Daya Manusia yang mumpuni di bidang Perencanaan, administrasi dan teknis
6. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan kepentingan, Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
7. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Karangrejo harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
8. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan social ekonomi berpengaruh pada pola kehidupan dari masyarakat.

Beban kerja untuk memenuhi standard maksimal pelayanan publik belum sebanding dengan jumlah personil yang ada di Kecamatan Karangrejo

2. Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik

Berdasarkan tabel tersebut, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Meningkatnya Kinerja Kecamatan mulai tahun 2021 – 2023 sudah mencapai target yang telah ditetapkan, akan tetapi masih banyak kinerja yang masih belum maksimal. Adapun dari (skoring) Kecamatan Karangrejo 82,35 beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh Kecamatan Karangrejo adalah:

1. Aspek penyelenggaraan pelayanan terpadu Kecamatan
 - Sarpras Pelayanan Kecamatan hendaknya dapat dilengkapi
2. Aspek Penyelenggaraan Tugas Asributif
 - Penyelenggaraan Perda yang terjadi di wilayah Kecamatan pada tahun berkenaan baik dari hasil laporan warga atau pantauan langsung yang dikoordinasikan Kecamatan kepada pihak-pihak terkait untuk dapat dipantau dan dikoordinasikan
3. Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan
 - Pelaksanaan Anggaran Kecamatan untuk dapat dilampirkan bukti dukungannya
4. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan
 - Fasilitasi yang dilakukan oleh Camat dalam merespon kasus/permasalahan sengketa pemberhentian perangkat desa dengan Kepala Desa. Berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017 bahwa Camat berperan mengantisipasi penyelesaian konflik yang terjadi antara perangkat desa dan kepala desa untuk dapat dievaluasi Kembali
5. Aspek Pelaksanaan Tugas Lainnya
 - Jumlah Penyuluh yang bergabung dalam Rumah Bersama Kecamatan serta Jumlah keseluruhan penyuluh yang terdapat di wilayah Kecamatan untuk dapat dilengkapi data dukungannya
 - Keberadaan SK Camat tentang kelompok kerja dalam Rumah Bersama Kecamatan untuk dapat dilengkapi

3. Nilai Predikat Kinerja Kecamatan

Berdasarkan tabel tersebut, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan mulai tahun 2024 sudah mencapai target yang telah ditetapkan, akan tetapi masih banyak kinerja yang masih belum maksimal. Adapun dari (skoring) Kecamatan Karangrejo 90,20 beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh Kecamatan Karangrejo adalah:

1. Aspek Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum

Jumlah kegiatan sosialisasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan oleh kecamatan maupun dihadiri oleh camat, Peringatan hari-hari besar nasional di kecamatan, Sosialisasi kegiatan pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah kepada masyarakat harap ditingkatkan supaya nilai dapat maksimal
2. Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan bisa lebih ditingkatkan
3. Aspek Pelaksanaan Tugas Lainnya
 - Kegiatan fasilitasi pemberian bantuan teknis pelaksanaan program Desa /Kelurahan Tangguh Bencana bisa ditambahkan

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD dilakukan analisis terhadap data perkembangan pendanaan pelayanan OPD (realisasi belanja pada tahun 2019-2024 untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan OPD (rasio antara dana yang dianggarkan dengan yang di realisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan OPD.

Dari data perkembangan pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Karangrejo Tahun 2019-2024 adalah sebagaimana adalah berikut :

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Karangrejo
Kabupaten Magetan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	470.000.000					448.049.049					58						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	245.000.000					244.165.895					100						
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000					14.996.500					100						
Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	50.000.000					48.967.700					99						
Program Pemberdayaan Kelurahan	2.176.118.000					2.077.907.693					71						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		3.519.344.329	3.339.348.109	3.116.032.472	2.827.003.566		3.022.137.967	3.213.756.658	3.049.115.994	2.786.275.719		85,87	96,24	97,85	98,56	0,19	0,07
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3.162.400	2.351.000	4.750.000	8.126.100		3.162.400	2.351.000	4.465.050	8.126.100		100	100	94	100	1,56	1,56
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		2.724.000	9.000.000	24.950.000	25.200.000		2.724.000	5.525.150	24.419.950	24.291.300		100	61,39	98,84	96,39	8,25	7,91
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		22.200.000	25.000.000	35.750.000	75.000.000		19.650.000	23.900.000	35.425.000	74.925.000		88,51	95,60	99,09	99,90	2,37	2,81
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		1.250.000	3.000.000	51.811.600	63.814.000		1.250.000	3.000.000	48.682.850	59.101.100		100	100	93,96	92,61	50,05	46,28
KEL KARANGREJO																	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			483.281.905	256.849.658	290.909.182			480.193.018	247.390.804	289.186.570			96,95	96,32	99,41	0,39	0,039
Program Pemberdayaan Masyarakat		515.069.000	650.000.000	825.000.000	860.000.000		469.111.120	595.201.600	796.440.808	838.184.988		91,07	91,57	96,54	97,46	0,32	0,40

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Desa dan Kelurahan																	
KEL. MANISREJO																	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			215.286.320	153.650.100	175.602.500			214.633.016	153.413.134	175.401.770			96,95	99,85	99,89	0,18	25,38
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		538.049.184	650.000.000	875.000.000	860.000.000		492.805.000	557.489.240	858.332.012	851.147.030		91,59	85,77	98,01	98,97	0,32	0,52

Tabel ini menampilkan data anggaran realisasi lima Program utama Kecamatan Karangrejo dari Tahun 2021 sampai dengan 2024. Secara umum rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang konsisten di atas 98,5 %, bahkan mencapai 100% pada Tahun 2021, 2022 dan 2024. Secara keseluruhan Kecamatan Karangrejo menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat trend penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu di cermati dalam perencanaan ke depan.

Dari table diatas juga menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan antara Tahun 2021 s/d 2024 cukup baik dengan rata-rata penyerapan diatas 89%.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Karangrejo sudah baik, Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain:

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target,
- Kemampuan Tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan Karangrejo

Sedangkan penghambat terserapnya Sebagian kecil anggaran adalah adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% seperti penyediaan jasa komunikasi dan listrik dan belanja pegawai.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karangrejo yaitu masyarakat di wilayah Kecamatan Karangrejo sebagai pengguna layanan Masyarakat Kecamatan Karangrejo sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik cepat dan gratis sebagaimana tercantum dalam sasaran Kecamatan Karangrejo yaitu terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal yang hanya bisa di capai dengan kemauan yang tinggi dari Pegawai Kecamatan Karangrejo yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta senantiasa meningkatkan inovasi pelayanan. Secara umum , kelompok masyarakat tersebut mencakup semua warga negara Indonesia, baik yang berdomisili tetap maupun tidak tetap, yang berada dalam batas wilayah administrasi kecamatan. Penduduk Kecamatan meliputi semua orang yang secara sah terdaftar sebagai penduduk kecamatan, termasuk anak-anak, orang dewasa, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Dengan demikian, pelayanan kecamatan mencakup seluruh penduduk di wilayah tersebut, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kualitas hidup.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pemberian layanan Kecamatan Karangrejo dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah kecamatan Karangrejo maupun perangkat daerah yang berada di luar wilayah kecamatan Karangrejo antara lain:

- Polsek Karangrejo untuk menyediakan layanan kemanan, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.
- Koramil Karangrejo untuk membantu dalam aspek pertahanan dan keamanan, serta kegiatan sosial masyarakat.
- Puskesmas Karangrejo untuk melakukan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan pengurusan BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu.
- Kantor Urusan Agama untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu dibutuhkan jika pernikahan mendadak ingin dilakukan, terutama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia pernikahan atau masih dibawah umur.
- Pemerintah Desa dalam rangka optimalisasi koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan Desa / Kelurahan.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan program/ kegiatan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan tidak memiliki dukungan BUMD dalam pencapaian

2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Sebagai perangkat daerah penunjang, Kecamatan tidak memiliki Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab kecamatan.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
 - Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan seperti kendaraan operasional, peralatan teknologi informasi, dan fasilitas pendukung lainnya yang mengurangi efisiensi kerja dan menghambat responsivitas pelayanan
 - Belum optimalnya kolaborasi antar sektor perangkat dalam mencapai tujuan kinerja pelayanan
2. Masih Rendahnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur Kecamatan
 - Tuntutan transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan menuntut kecamatan untuk beradaptasi dan mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang memerlukan perubahan mindset dan kapabilitas aparatur
3. Belum optimalnya koordinasi kecamatan dengan instansi vertikal dan horizontal di wilayah Kecamatan
 - Koordinasi antar instansi vertikal (seperti POLSEK, KORAMIL) dan horizontal (dinas-dinas daerah) di wilayah kecamatan masih sering terkendala oleh ego sektoral dan mekanisme kerja yang belum terintegrasi secara optimal.
4. Belum optimalnya Pembangunan wilayah Desa / Kelurahan di Kecamatan karena kurangnya adaptasi Kecamatan terhadap dinamika kewilayahan yang sangat dinamis
 - Dinamika kewilayahan yang sangat dinamis, seperti pertumbuhan penduduk, tuntutan globalisasi, kerawanan bencana, serta keamanan dan ketertiban masyarakat seringkali tidak diimbangi dengan kemampuan perencanaan dan responsif yang memadai di tingkat kecamatan
 - Koordinasi antara pelaku kepentingan mengenai Pembangunan di wilayah Desa/Kelurahan masih kurang terintegrasi

2.2.2 Isu Strategis

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran , strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Karangrejo dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10
Perumusan Isu Strategis Kecamatan Karangrejo

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi memfokuskan pembangunan desa/kelurahan	Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan	Belum optimalnya Kelembagaan, birokrasi,serta transparansi informasi dan komunikasi publik	Tuntutan tata kelola pemerintahan yang efektif dan adaptif dalam menghadapi era globalisasi dan keterbukaan.	Agenda Reformasi Birokrasi Nasional, termasuk penguatan peran kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin kompleks dan cepat.	Penguatan Kelembagaan Kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM serta kolaborasi antar Perangkat Daerah/ stakeholder terkait

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Belum optimalnya koordinasi kecamatan dengan instansi vertical dan horizontal di wilayah Kecamatan		Kompleksitas masalah global (ekonomi, kesehatan, lingkungan) yang menuntut koordinasi lintas sektor sampai ke level kecamatan	Program nasional lintas sektor (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, keamanan, sosial) yang membutuhkan penguatan koordinasi kecamatan dengan instansi vertikal.	Banyaknya program lintas sektor di tingkat daerah yang harus diimplementasikan di wilayah kecamatan	Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas instansi di wilayah kecamatan
	Rendahnya Kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Kecamatan		Tuntutan global terhadap profesionalis me aparaturn pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola yang	Agenda Reformasi Birokrasi Nasional yang berfokus pada peningkatan kompetensi, integritas, dan kinerja ASN	Perubahan kebutuhan masyarakat lokal yang menuntut aparaturn kecamatan lebih adaptif, responsif, dan profesional	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM aparaturn kecamatan

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
			transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan			
	Belum optimalnya Pembangunan wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan karena kurangnya adaptasi Kecamatan terhadap dinamika kewilayahan yang sangat dinamis		Globalisasi ekonomi dan teknologi digital yang mendorong perubahan cepat dalam pola sosial- ekonomi wilayah	Agenda transformasi digital nasional yang mengubah pola pelayanan, ekonomi, dan interaksi kewilayahan	Mobilitas penduduk antar wilayah yang berdampak pada kebutuhan layanan administrasi kependudukan, sosial, dan ekonomi di kecamatan	Optimalisasi koordinasi dan fasilitasi terkait Pembangunan desa/kelurahan serta peningkatan kemampuan adaptasi kecamatan terhadap dinamika kewilayahan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolak ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan. Pada periode RPJMD baru ini, Visi pembangunan daerah Kabupaten Magetan pada periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“MAGETAN NYAMAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”

MAGETAN NYAMAN, mencerminkan harapan untuk menciptakan kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Magetan. Kata "nyaman" mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan psikologis.

MAGETAN MAJU, mencerminkan tekad untuk mengantarkan Kabupaten Magetan menjadi wilayah yang berkembang pesat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

MAGETAN BERKELANJUTAN, mencerminkan komitmen Kabupaten Magetan untuk melaksanakan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Magetan tahun 2025-2029 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian Misi sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Andal dan Berdaya Saing Kuat
2. Mengembangkan Sektor Pertanian, Mendorong Hilirisasi Produk Unggulan Berbasis UMKM, Koperasi untuk Memantapkan Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan
3. Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Sosial dan Pembangunan Wilayah Perdesaan
4. Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Professional, Responsive, Adaptif dan Transparan
5. Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Menurunkan Pengangguran
6. Membangun Infrastruktur Strategis untuk

Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah

7. Membangun Kehidupan Masyarakat yang Guyup Rukun, Aman, Tenteram berasaskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau.

Dalam kerangka perencanaan strategis, Misi Politis sejumlah 7 misi sebagaimana telah dijelaskan diatas, di transformasikan menjadi tujuan guna menyederhanakan penyusunan arsitektur kinerja pembangunan. Proses transformasi ini dilakukan dengan tetap mempertahankan esensi dan makna orisinal dari masing-masing Misi Kepala Daerah. Secara lengkap diuraikan dalam tabel berikut:

VISI	MAGETAN NYAMAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN	
MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Membangun SDM yang Andal dan Berdaya Saing Kuat 7. Membangun Kehidupan Masyarakat yang Guyup Rukun, Aman, Tenteram berasaskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau	Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		3. Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan
		4. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berasaskan Nilai Agama
2. Mengembangkan Sektor Pertanian, Mendorong Hilirisasi Produk Unggulan Berbasis UMKM, Koperasi untuk Memantapkan Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan 5. Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Menurunkan Pengangguran 6. Membangun Infrastruktur Strategis untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah 7. Membangun Kehidupan Masyarakat yang Guyup Rukun, Aman, Tenteram berasaskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau	Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan	1. Meningkatnya Investasi Daerah
		2. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Daerah
		3. Meningkatnya Kemandirian Sektor Pertanian Berbasis Industri dan Perdagangan
		4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan
		5. Menurunnya Angka Pengangguran melalui Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan
3. Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Sosial dan Pembangunan Wilayah Perdesaan	Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Adaptif dan Transparan	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
		3. Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik
		4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		5. Meningkatnya Kualitas ASN
		6. Meningkatnya Daya Saing dan Inovasi Daerah
4. Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan

		2. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan
		3. Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah

Sesuai tugas dan fungsi pokoknya, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan mempunyai peran untuk mensukseskan tujuan ke 3 “Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Reponsif, Adatif dan Transparan “ dengan sasaran “ *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik* ”.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 maka disusunlah tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan beserta target tahunan yang menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah ini di maksudkan untuk mempermudah penetapan indikator kinerja dan target tahunan secara terarah dan terukur. Tujuan dan sasaran Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Karangrejo
Kabupaten Magetan tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NSPK : Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah Urusan Kewilayahan Sasaran RPJMD Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Karangrejo		Indeks Kepuasan Masyarakat	89	90,50	91	91,50	92	93	IKU
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Kecamatan Karangrejo	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	90,20	90,25	90,30	90,35	90,40	90,45	IKU
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan Karangrejo	Nilai SAKIP	89,45	89,50	89,55	89,60	89,65	89,70	IKU

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Karangrejo.

Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Karangrejo Kab Magetan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Penahapan Strategi Kecamatan Karangrejo

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsolidasi pelaksanaan awal Renstra dan penguatan dasar sistem dasar, peningkatan kapasitas SDM, dan penyusunan regulasi pendukung	Penguatan Penerapan sistem, integrasi layanan, dan peningkatan partisipasi publik	Pendalaman Evaluasi sistem, penyempurnaan berkelanjutan, dan inovasi layanan untuk mendukung konsistensi pelayanan publik dan koordinasi fasilitasi kewilayahan	Pematangan Keberlanjutan sistem dan upaya transformasi digital dalam pelayanan publik maupun penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kewilayahan sebagai dasar penyusunan arah kebijakan berikutnya,	Penyelesaian target indikator strategis, evaluasi akhir pelaksanaan Renstra supaya tercapai peningkatan Kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan serta memastikan keberlanjutan transformasi digital pelayanan publik dan koordinasi fasilitasi kewilayahan.

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Kecamatan Karangrejo dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra disajikan dalam tabel sbb:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Kecamatan Karangrejo

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan Kewenangan Pmerintah Daerah Urusan Kewilayahan	Memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat disetiap lingkungan RT	Peningkatan penguatan tata kelola pemerintahan melalui modernisasi administrasi pemerintahan dan penguatan sistem pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi kecamatan	
			Peningkatan Kapasitas Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Penguatan Budaya Kerja Inovatif	
			Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan publik di wilayah Kecamatan	
			Optimalisasi partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan wilayah dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan melalui Penguatan Mekanisme Musrenbang dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	
			Optimalisasi pelayanan publik melalui standarisasi layanan publik serta pengembangan inovasi pelayanan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Karangrejo yang telah ditetapkan maka Perangkat Daerah melaksanakan program, kegiatan dan sub-kegiatan. Program, kegiatan dan sub-kegiatan merupakan hasil *cascading* dari pohon kinerja dalam penentuan *final outcome*, *intermediate outcome*, *outcome* dan *output* dalam mencapai kinerja Kecamatan Karangrejo mulai tahun 2025 s.d 2030. Secara lengkap pengambilan program, kegiatan dan sub-kegiatan disajikan dalam tabel sebagaimana berikut :

4.1. Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan Perangkat Daerah hasil *Cascading* dari Tujuan, Sasaran, *Outcome* dan *Output*

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Karangrejo yang telah ditetapkan maka Perangkat Daerah melaksanakan program, kegiatan dan sub-kegiatan. Program, kegiatan dan sub-kegiatan merupakan hasil *cascading* dari pohon kinerja dalam penentuan *final outcome*, *intermediate outcome*, *outcome* dan *output* dalam mencapai kinerja Kecamatan Karangrejo mulai tahun 2025-2030. Secara lengkap pengambilan program, kegiatan dan sub-kegiatan disajikan dalam tabel sebagaimana berikut:

Tabel 4.1
Perumusan Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan Kecamatan Karangrejo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NSPK : Melaksanakan Kewenangan Pmerintah Daerah Urusan Kewilayahan Sasaran RPJMD Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Kecamatan Karangrejo			Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial Kecamatan Karangrejo		<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Evaluasi Kinerja Kelurahan - Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial 	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terwujudnya kelurahan yang berdaya, sejahtera, tangguh bencana, dengan pelayanan publik yang efektif dan pembangunan partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah lembaga pemberdayaan Kelurahan yang aktif 2. Jumlah Laporan IKM Kelurahan 3. Jumlah usulan musrenbangkel yang terfasilitasi 4. Jumlah penanganan kasus trantibum di wilayah kelurahan 5. Persentase masyarakat miskin yang terfasilitasi 	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					pdalam program sosial		
				Terlaksananya pembangunan sarana prasarana kelurahan dengan melibatkan Partisipasi aktif masyarakat	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terlaksananya pemberdayaan di kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat	Jumlah Pokmas / Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan bencana yang efektif	Jumlah fasilitasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan bencana	Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa	
				Tersedianya laporan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang kesejahteraan sosial, kepemudaan, kesehatan keluarga berencana dan penanganan bencana	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Desa dan pembangunan wilayah kecamatan secara partisipatif		<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Desa mandiri di wilayah kecamatan 2. Persentase Usulan Musrenbang desa dan kelurahan yang sesuai ketentuan dan di akomodir kecamatan 	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya tahapan perencanaan dan penganggaran pemerintah desa serta pembangunan wilayah yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan 2. Persentase usulan musrenbang yang terfasilitasi 	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya dokumen Pemerintahan serta pembangunan Desa yang berkualitas	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Terciptanya ketentraman dan ketertiban diwilayah kecamatan		Persentase penyelesaian potensi gangguan kamtibmas di Wilayah kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya koordinasi Trantibmas di tingkat kecamatan (Forkopimca)	Jumlah koordinasi kamtibmas dan penegakan perda yang dilaksanakan secara efektif	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Tersedianya Laporan koordinasi Kamtibmas, penegakan Perda dan pembinaan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI , Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				persatuan kesatuan bangsa di wilayah Kecamatan	Kecamatan		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan lembaga Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan		Nilai indeks Pelayanan Publik Persentase Lembaga pemberdayaan masyarakat desa /kelurahan yang aktif dan telah ditetapkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya pelayanan administrasi, perpajakan, perizinan, dan pembinaan lembaga pemberdayaan Masyarakat yang efektif	1. Jumlah koordinasi dan fasilitasi pelayanan adminduk , pajak PBB dan perizinan yang dilaksanakan secara efektif 2. Jumlah Laporan Kinerja lembaga	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				di kecamatan	pemberdayaan Desa/Kelurahan terfasilitasi		
				Tersedianya dokumen pelayanan administrasi kependudukan, perpajakan, perizinan, dan administrasi perangkat serta Lembaga pemberdayaan Desa/Kelurahan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan Karangrejo			Nilai SAKIP		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien		Indeks Kepuasan Layanan kesekretariatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan, Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	
				Terlaksananya a Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terkelolanya barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Prosedur	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Kelurahan	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
				Terkelolanya barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan logistik yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistic kantor	
				Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitasi Penunjang Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Perkantoran			
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui Birokrasi yang profesional serta pelayanan Administrasi Publik yang efektif dan efisien		<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan 2. Persentase capaian Kinerja dan Anggaran 	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran yang sesuai perencanaan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terkelolanya Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai prosedur	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Pelayanan kepegawaian Kecamatan Karangrejo	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan SDM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Perangkat daerah	Pelatihan		
				Terkelolanya dokumen kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Pendukung Kinerja Kecamatan Karangrejo	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah	
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Perangkat daerah		dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya a Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Barang dan Jasa Penunjang Kinerja Kecamatan Karangrejo	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Kebutuhan peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Pelengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				perlengkapan Kantor	yang disediakan	Kantor	
				Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitas Penunjang kegiatan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pada Kecamatan Karangrejo	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Karangrejo	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Draft Analisis Data Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Draft Analisis Data Evaluasi Kinerja dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan dan pelaksanaan Anggaran yang sesuai perencanaan	Persentase Deviasi serapan anggaran	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	

4.2. Program kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur

Penyusunan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada dokumen perencanaan ini secara konsisten mengacu dan diselaraskan dengan nomenklatur resmi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan standarisasi bidang urusan pemerintahan. Keselarasan dengan nomenklatur ini bertujuan untuk menjamin konsistensi, akurasi, dan keterbandingan data perencanaan dan penganggaran baik pada tingkat perangkat daerah, pemerintah daerah, maupun dengan tingkat nasional. Secara operasional, acuan nomenklatur diterjemahkan ke dalam struktur perencanaan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan Kecamatan Karangrejo

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOMES /KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KECAMATAN					3.159.426.721		3.333.912.205		3.500.607.798		3.675.638.193		3.859.420.160
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Kecamatan Karangrejo terhadap Layanan Keseekretariatan Kecamatan	80 Skor	81 Skor										
Outcome: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien di Kecamatan	1. Indeks kepuasan layanan keseekretariatan // Skor 2. Persentase capaian Kinerja dan Anggaran //%	84 Skor 96,75%	84,5 Skor 97%	85 Skor 97,75%	3,002,539,721	86 Skor 98%	3,164,140,855	87 Skor 98,20%	3,322,347,898	88 Skor 98,40%	3,488,465,293	92 Skor 98,60%	3,662,888,560

Karangrejo													
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Outcome : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Karangrejo	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	3.620.000	8 Dokumen	3.801.000	8 Dokumen	3.991.050	8 Dokumen	4.190.700	8 Dokumen	5.512.500
BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOMES /KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Output : Tersusunnya Draft Analisis Data Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	3.620.000	8 Dokumen	3.801.000	8 Dokumen	3.991.050	8 Dokumen	4.190.700	8 Dokumen	5.512.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output : Terlaksananya pelayanan Administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran yang sesuai	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23	23										
	Persentase Deviasi Serapan Anggaran Perangkat Daerah %	2,30 %	2,25%	2,20%	2.695.102.271	2,15%	2.826.107.655	2,10%	2.972.421.498	2,00%	3.125.304.580	2,90%	3.275.193.006

perencanaan													
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Output : Tersedianya Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN//orang/bulan	266 /orang /Bulan	266 /orang /Bulan	266 /orang /Bulan	2.683.675.221	266 /orang /Bulan	2.822.336.755	266 /orang /Bulan	2.952.068.673	266 /orang /Bulan	3.110.431.618	266 /orang /Bulan	3.228.244.510
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan/ semesteran SKPD Output : Tersedianya Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD//Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.690.000	12 Laporan	3.875.000	12 Laporan	3.874.500	12 Laporan	4.068.225	12 Laporan	4.271.650
BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOMES /KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Output : Terkelolanya barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Pengelolaan Barang milik daerah sesuai prosedur//Bulan	12 Bulan	0			12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Output : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD //Laporan	12 Laporan	0			12 Laporan	5.000.000	Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Output : Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian Kecamatan Karangrejo	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur//Orang	23 orang	0			23 orang	5.000.000	23 orang	8.000,000	23 orang	8.000.000	23 orang	8.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan//orang	23 orang	0			23 orang	5.000.000	23 orang	8.000,000	23 orang	8.000.000	23 orang	8.000.000
Pendataan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Output : Terkelolanya dokumen Kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian //Dokumen	5 dokumen	0			5 dokumen	1.000.000	5 dokumen	2.000.000	5 dokumen	2.000.000	5 dokumen	2.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah Output Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung Kinerja Kecamatan Karangrejo	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah //Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	98.469.400	12 bulan	113.340.700	12 bulan	118.178.525	12 bulan	131.335.113	12 bulan	164.083.600

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOMES /KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan// Paket	12 paket	12 paket	12 paket	4.725.000	12 paket	4.961.250	12 Paket	4.961.250	12 paket	5.209.350	12 paket	5.469.800
Penyediaan peralatan perlengkapan kantor Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket	4 paket	4 paket	4 paket	30.000.000	5 paket	32.500.000	5 paket	42.000.000	6 paket	45.000.000	2 paket	50.000.000
Penyediaan peralatan rumah tangga Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket	5 paket	0	5 paket	1.000.000	5 paket	1.200.000	6 paket	2,500,000	5 paket	3,000,000	5 paket	3,500,000
Penyediaan bahan logistik kantor Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket	12 paket	12 paket	12 paket	31.800.000	12 paket	31.500.000	12 paket	35.490.000	12 paket	37.264.500	12 paket	39.127.725

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan Paket	12 paket	12 paket	12 paket	8.061.450	12 paket	8.473.750	12 paket	8.464.550	12 paket	8.887.800	12 paket	9.332.150
Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD Output : Terlaksananya Fasilitas Penunjang Kegiatan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	31,000,000	12 Laporan	35,000,000	12 Laporan	36,750,000	12 Laporan	38,587,500	12 Laporan	47.231.100
BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOMES /KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Karangrejo	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	141.443.050	12 Laporan	147.791.000	12 Laporan	148.066.000	12 Laporan	144.184.600	12 Laporan	151.358.725
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan //Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	21.426.450	12 Laporan	22.050.000	12 Laporan	22.050.000	12 Laporan	23.152.500	12 Laporan	24.310.125

Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan// Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14.500.000	12 Laporan	15.225.000	12 Laporan	15.500.000	12 Laporan	10.700.000	12 Laporan	11.900.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan //Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	105.516.600	12 Laporan	105.516.000	12 Laporan	110.516.000	12 Laporan	110.332.100	12 Laporan	115.148.600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Karangrejo	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah // Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	63.525.000	12 Bulan	66.701.500	12 Bulan	69.181.875	12 Bulan	72.641.000	12 Bulan	103.840.400
BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOMES /KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	47.250.000	6 Unit	49.612.500	6 Unit	52.093.125	6 Unit	54.697.800	6 Unit	60.000.000

perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya//Unit												
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi./Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	16.275.000	1 Unit	17.089.000	I Unit	17.088.750	1 Unit	17.943.200	I Unit	43.840.400
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	16.700.000	100%	22.575.000	100%	23.703.750	100%	24.888.950	100%	26.133.400
Outcome Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan lembaga masyarakat serta aparatur desa di wilayah Kecamatan	1. Nilai Indeks pelayanan public //Indeks 2. Persentase lembaga kemasyarakatan desa /kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi	1,7 Indeks 100%	1,9 Indeks 100%	2,0 Indeks 100%	4,100,000	2,2 Indeks 100%	4,500,000	2,2 Indeks 100%	5,000,000	2,2 Indeks 100%	6,000,000	2,2 Indeks 100%	7,000,000

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOMES /KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Outcome : Terlaksananya Pelayanan administrasi, perpajakan,perizinan, dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang efektif di Kecamatan	1. Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	12										
	1.Jumlah koordinasi dan fasilitasi pelayanan adminduk , pajak PBB dan perizinan yang dilaksanakan secara Efektif //Kegiatan 2.Jumlah koordinasi dan fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang dilaksanakan secara Efektif //Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	4,100,000	12 Kegiatan	4,500,000	12 Kegiatan	5,000,000	12 Kegiatan	6,000,000	12 Kegiatan	7,000,000
		13 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan		13 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan		13 Kegiatan		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Output :	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan//	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4.100.000	4 Dokumen	4.500.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	6.000.000	4 Dokumen	7.000.000

Tersedianya dokumen Pelayanan administrasi kependudukan, perpajakan, perizinan, dan administrasi perangkat serta Lembaga PemberdayaanDesa/ Kelurahan yang berkualitas	Dokumen												
BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOMES /KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN	PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN //%	100%	100%										
Outcome: Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintah bidang kesejahteraan sosial	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial//%	100%	100%	100%	26,460,000	100%	27,783,000	100%	29,172,150	100%	30,630,750	100%	32,162,300
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Outcome : Terlaksananya fasilitasi	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12	12										

dan koordinasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan bencana yang efektif													
	Jumlah fasilitasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan Bencana//Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	26.460.000	12 Kegiatan	27.783.000	12 Kegiatan	29.172.150	12 Kegiatan	30.630.750	12 Kegiatan	32.162.300
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Output : Tersedianya laporan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang kesejahteraan sosial , kepemudaan , kesehatan , keluarga berencana dan penanganan bencana	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan// Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	26.460.000	12 Laporan	27.783.000	12 Laporan	29.172.150	12 Laporan	30.630.750	12 Laporan	32.162.300
BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOMES /KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Outcome :	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum//Persen	100	100										
	Persentase penyelesaian potensi	100%	100%	100%	75,000,000	100%	78,750,000	100%	82,687,500	100%	86,821,900	100%	91,163,000

Terciptanya ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan	gangguan kamtibmas di wilayah kecamatan //Persen												
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Outcome : Terlaksananya Koordinasi Trantibmas di Tingkat kecamatan (Forkopimca)	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	24	12										
	Jumlah koordinasi trantibmas dan penegakan perda yang dilaksanakan secara efektif //kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	75.000.000	12 Kegiatan	78.750.000	12 Kegiatan	82.687.500	12 Kegiatan	86.821.900	12 Kegiatan	91.163.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertical diwilayah kecamatan Output : Tersedianya Laporan Koordinasi Kamtibmas , penegakan Perda dan pembinaan persatuan kesatuan bangsa di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan// Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	10 Kegiatan	75.000.000	10 Kegiatan	78.750.000	10 Kegiatan	82.687.500	10 Kegiatan	86.821.900	10 Kegiatan	91.163.000
BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOMES /KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026	2027	2028	2029	2030					

			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Desa dan pembangunan Wilayah Kecamatan secara partisipatif	Persentase Desa / Kelurahan Dengan Nilai Monev Terpadu Minmal 80	75	77										
	1.Persentase Desa Mandiri diwilayah kecamatan //%	36,36%	36,36%	45.45%	38.727.000	54.54%	40.663.350	63.63%	42.696.500	72.72%	44.831.300	81.81%	47.072.900
	2. Persentase usulan musrenbang desa / Kelurahan yang sesuai ketentuan dan diakomodir kecamatan//%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Outcome : Terlaksananya tahapan perencanaan dan penganggaran pemerintah desa serta pembangunan wilayah yang berkualitas	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa//%	100	100										
	1. Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan//% 2. Persentase usulan musrenbang yang Terfasilitasi//%	100%	100%	100%	51.327.000	100%	58.738.350	100%	61.310.200	100%	63.720.250	100%	66.206.300
		100%	100%	100%									

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOMES /KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Output : Tersedianya dokumen Pemerintahan serta pembangunan desa yang berkualitas	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintah desa //Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen	
KEL KARANGREJO					1.073.000.000		1.126.650.000		1.182.982.400		1.242.131.400		1.304.237.950
PROGRAM PENUNJANGURUSA N PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kepuasan ASN Kelurahan Karangrejo terhadap Layanan Keseekretariatan// Nilai	80 Nilai	80 Nilai										
Outcome: Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien pada	Indeks Kepuasan Layanan Keseekretariatan//Skor	79 Skor	80 Skor	81 Skor	300.429.900	82 Skor	315.451.395	83 Skor	331.223.900	84 Skor	347.785.000	85 Skor	365.174.250

Kelurahan Karangrejo													
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output : Terlaksananya Pelayanan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran yang sesuai perencanaan	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah //Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.589.200	12 Bulan	1.668.660	12 Bulan	1.752.093	12 Bulan	1.839.700	12 Bulan	1.931.000
BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOMES /KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
		2025	2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD Output : Tersedianya Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan/ semesteran SKPD //Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.589.200	12 Laporan	1.668.660	12 Laporan	1.752.093	12 Laporan	1.839.700	12 Laporan	1.931.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Otput : Terkelolanya barang milik daerah pada	Jumlah Pengelolaan Barang milik daerah sesuai prosedur //Bulan	12 Bulan	12Bulan			12 Bulan	5.000.000	12Bulan	5.000.000	12Bulan	5.000.000	12Bulan	5.000.000

perangkat daerah													
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Output : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD //Laporan	12 Laporan	0	0	0	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah Output : Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung Kinerja Kelurahan Karangrejo	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah //bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	51.393.700	12 Bulan	54.895.124	12 Bulan	55.545.983	12 Bulan	57.346.237	12 Bulan	62.487.850
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Output : Terkelolanya Barang yang Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan// Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	3.319.500	12 Paket	3.485.475	12 Paket	3.659.750	12 Paket	3.842.750	12 Paket	4.034.800
BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOMES /KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Output :	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan//	12 Paket	12 Paket	12 Paket	13.135.400	12 Paket	15.353.890	12 Paket	16.811.125	12 Paket	15.205.850	12 Paket	16.534.850

Terkelolanya Barang yang Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Paket												
Penyediaan peralatan rumah tangga Output Terkelolanya Barang yang Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan//Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	3.054.950	12 Paket	3.207.698	12 Paket	3.368.100	12 Paket	3.536.450	12 Paket	3.713.300
Penyediaan bahan logistic kantor Output : Terkelolanya Barang yang Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan//Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	11.668.350	12 Paket	10.690.047	12 Paket	12.947.750	12 Paket	13.678.400	12 Paket	14.362.300
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : Terkelolanya Barang yang Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan//Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	5.698.900	12 Paket	5.353.845	12 Paket	5.621.550	12 Paket	5.902.600	12 Paket	6.197.700
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Output : Terlaksananya Fasilitasi Penunjang kegiatan Perkantoran	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD//Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.750.000	12 Laporan	16.000.000	12 Laporan	17.364.400	12 Laporan	18.232.500

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Tersedianya Sarana dan PrasaranaPerkantoran Pendukung Kinerja Kelurahan Karangrejo	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah//bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	187.010.500	12 Bulan	196.361.025	12 Bulan	206.095.650	12 Bulan	216.400.350	12 Bulan	225.120.050
BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOMES /KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik// Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15.500.000	12 Laporan	16.275.000	12 Laporan	17.088.750	12 Laporan	17.943.200	12 Laporan	18.840.300
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatandan perlengkapan kantor//Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.920.000	12 Laporan	2.016.000	12 Laporan	2.116.800	12 Laporan	2.222.550	12 Laporan	2.333.750

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor //Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	169.590.500	12 Laporan	173.070.025	12 Laporan	181.890.100	12 Laporan	191.234.600	12 Laporan	201.046.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Pendukung Kinerja Kelurahan Karangrejo	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah // Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	51.830.200	12 Bulan	57.421.710	12 Bulan	63.376.157	12 Bulan	69.544.950	12 Bulan	78.123.200
BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOMES /KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, Dan pajak kendaraan perorangan dinas //Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	700.000	3 Unit	735.000	3 Unit	771.750	3 Unit	810.400	3 Unit	2.850.000

jabatan Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah													
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi //Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	59.253.100	1 Unit	62.845.755	1 Unit	64.196.132	1 Unit	69.204.100	1 Unit	70.097.750
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	100	100										
Outcome: Meningkatnya kualitaskinerja kelurahan sertakinerja pemerintahan bidang kesejahteraan social	Nilai Evaluasi Kinerja Kelurahan //.Nilai	79 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	772.570.100	81 Nilai	811.198.605	82 Nilai	851.758.500	83 Nilai	894.346.400	84 Nilai	939.063.700

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOMES /KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Kegiatan Pemberdayaan kelurahan Outcome : Terwujudnya kelurahan yang berdaya, sejahtera, tangguh bencana, dengan pelayanan publik yang efektif dan pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	12 Keg	12 Keg										
	Jumlah lembaga pemberdayaan Kelurahan Yang aktif//Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga		8 Lembaga		8 Lembaga		8 Lembaga		8 Lembaga	
	Jumlah Laporan IKM Kelurahan Karangrejo //Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	772.570.100	1 Laporan	811.198.605	1 Laporan	851.758.500	1 Laporan	894.346.400	1 Laporan	939.063.700
	jumlah usulan musrenbang kel yang terfasilitasi //Usulan	5 Usulan	6 Usulan	7 Usulan		4 Usulan		5 Usulan		4 Usulan		5 Usulan	
	jumlah penanganan kasus trantibum diwilayah kelurahan //Kasus	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus		1 Kasus		1 Kasus		1 Kasus		1 Kasus	
	persentase masyarakat miskin yang terfasilitasi dalam program social//%	79%	79%	80%		85%		90%		95%		100%	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Output :	Jumlah Sarana Dan Prasarana kelurahan yang dibangun//Unit	3Unit	3Unit	9 unit	400.055.750	9unit	422.558.537	5unit	441.124.450	4unit	463.180.650	4unit	486.339.670

Terlaksananya pembangunan sarana prasarana kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat													
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOMES / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Output : Terlaksananya pemberdayaan di kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan // Pokmas	12 Pokmas	12 Pokmas	8 Pokmas	372.514.350	8 Pokmas	388.640.068	8 Pokmas	410.634.050	8 Pokmas	431.165.750	8 Pokmas	452.724.030
KEL MANISREJO					1.057.000.000		1.170.482.905		1.229.007.050		1.290.457.400		1.354.980.300
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kepuasan ASN Kelurahan Manisrejo terhadap Layanan Kesekretariatan // Nilai	80 Nilai	80 Nilai										
Outcome: Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	79 Indeks	80 Indeks	81 Indeks	282,865,800	82 Indeks	313,232, 905	83 Indeks	328,894, 550	84 Indeks	345,339, 300	85 Indeks	362,606, 300

<p>baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien Kelurahan Manisrejo</p>																
<p>BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOMES /KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN/ OUTPUT</p>	<p>INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT</p>	<p>BASELINE 2024</p>	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN													
			<p>2025</p>	<p>2026</p>		<p>2027</p>		<p>2028</p>		<p>2029</p>		<p>2030</p>				
			<p>TARGET</p>	<p>TARGET</p>	<p>PAGU</p>	<p>TARGET</p>	<p>PAGU</p>	<p>TARGET</p>	<p>PAGU</p>	<p>TARGET</p>	<p>PAGU</p>	<p>TARGET</p>	<p>PAGU</p>	<p>TARGET</p>	<p>PAGU</p>	
<p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output : Terlaksananya Pelayanan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran yang sesuai perencanaan</p>	<p>Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah // Bulan</p>	<p>12 Bulan</p>	<p>12 Bulan</p>	<p>12 Bulan</p>	<p>2.000.000</p>	<p>12 Bulan</p>	<p>2.100.000</p>	<p>12 Bulan</p>	<p>2.205.000</p>	<p>12 Bulan</p>	<p>2.315.250</p>	<p>12 Bulan</p>	<p>2.431.000</p>			

koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD Output : Tersedianya Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD //Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.100.000	12 Laporan	2.205.000	12 Laporan	2.315.250	12 Laporan	2.431.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Output : Terkelolanya barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Pengelolaan Barang milik daerah sesuai prosedur//Laporan	12 Laporan				12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Output : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan				12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah Output : Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung Kinerja Kelurahan Manisrejo	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah//bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	63.628.850	12 Bulan	83.302.905	12 Bulan	87.468.050	12 Bulan	91.851.475	12 Bulan	94.393.650
BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOMES /KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU

Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan Bangunan kantor Output : Terkelolanya Barang yang Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan // Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	2.836.100	12 Paket	2.977.905	12 Paket	3.126.800	12 Paket	3.283.100	12 Paket	3.447.200
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Output : Terkelolanya Barang yang Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan//Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	30.229.600	12 Paket	48.000.000	12 Paket	50.400.000	12 Paket	52.920.000	12 Paket	55.566.000
Penyediaan peralatan rumah tangga Output Terkelolanya Barang yang Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang di sediakan //Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	5.363.050	3 Paket	5.775.000	3 Paket	6.063.750	3 Paket	6.366.900	3 Paket	6.685.200
Penyediaan bahan logistic kantor Output : Terkelolanya Barang yang Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah paket bahan logistic kantor yang Disediakan //Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	10.301.950	12 Paket	10.925.000	12 Paket	11.471.250	12 Paket	12.053.800	12 Paket	12.647.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : Terkelolanya Barang yang Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan//Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	4.898.150	12 Paket	5.125.000	12 Paket	5.381.250	12 Paket	5.650.350	12 Paket	5.932.850
BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOMES /KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Output : Terlaksananya Fasilitasi Penunjang kegiatan Perkantoran	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD//Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.500.000	12 Laporan	11.025.000	12 Laporan	11.576.250	12 Laporan	12.155.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Pendukung Kinerja Kelurahan Manisrejo	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah//bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	163.000.000	12 Bulan	172.130.000	12 Bulan	180.736.500	12 Bulan	189.763.325	12 Bulan	199.261.950

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik yang disediakan //Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12.400.000	12 Laporan	14.000.000	12 Laporan	14.700.000	12 Laporan	15.435.000	12 Laporan	16.206.750
Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan //Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.600.000	12 Laporan	2.730.000	12 Laporan	2.866.500	12 Laporan	3.000.900	12 Laporan	3.160.300
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan //Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	148.000.000	12 Laporan	150.400.000	12 Laporan	158.170.000	12 Laporan	166.328.500	12 Laporan	174.894.900
BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOMES /KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah // Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	54.236.950	12 Bulan	55.700.000	12 Bulan	58.485.000	12 Bulan	61.409.250	12 Bulan	66.519.700

Daerah Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kelurahan Manisrejo													
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, Dan pajak kendaraan perorangan dinas //Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1.636.950	3 Unit	700.000	3 Unit	735.000	3 Unit	771.750	3 Unit	810.400
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi// Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	52.600.000	1 Unit	55.000.000	1 Unit	57.750.000	1 Unit	60.637.500	1 Unit	63.669.700
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	80	80										
Outcome: Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan sertakinerja pemerintahan bidang	Nilai Evaluasi Kinerja Kelurahan//.Nilai	79 Nilai	79,5 Nilai	80 Nilai	774.134.200	81 Nilai	857.250.000	82 Nilai	900.112.500	83 Nilai	945.118.100	84 Nilai	992.374.000

kesejahteraan sosial													
BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOMES /KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Kegiatan Pemberdayaan kelurahan Outcome : Terwujudnya Kelurahan yang berdaya, sejahtera, tangguh bencana,dengan pelayanan publik yang efektif dan pembangunan Partisipatif	Jumlah lembaga pemberdayaan Kelurahan yang aktif	9	9										
	Jumlah lembaga pemberdayaan Kelurahan Yang aktif//Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	774.134.200	8 Lembaga	857.250.000	8 Lembaga	900.112.500	8 Lembaga	945.118.100	8 Lembaga	992.374.000
	Jumlah Laporan IKM Kelurahan Karangrejo //Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
	jumlah usulan musrenbang kel yang terfasilitasi //Usulan	5 Usulan	6 Usulan	6 Usulan		4 Usulan		4 Usulan		4 Usulan		3 Usulan	
	jumlah penanganan kasus trantibum di wilayah kelurahan //Kasus	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus		1 Kasus		1 Kasus		1 Kasus		1 Kasus	
	persentase masyarakat miskin yang terfasilitasi dalam program sosial//%	79%	79,50%	80%		85%		90%		95%		100%	

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Output : Terlaksananya pembangunan sarana prasarana kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat	Jumlah Sarana Dan Prasarana kelurahan yang dibangun//Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	371.634.200	5 Unit	450.000.000	4 Unit	472.700.000	4 Unit	496.125.000	5 Unit	520.931.250
Pemberdayaan masyarakat diKelurahan Output : Terlaksananya pemberdayaan di kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan // Pokmas /Ormas	8 Ormas	8 Ormas	8 Ormas	402.500.000	8 Ormas	407.250.000	8 Ormas	427.412.500	8 Ormas	448.993.100	8 Ormas	471.442.750
Total					3,649,298,293		3,833,439,000		4,023,785,000		4,225,000,000		4,435,350,000

4.3 Sub-kegiatan dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2025-2029, Kecamatan Karangrejo mempunyai peran untuk mensukseskan Misi Ke-3 dengan tujuan “*Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Adaptif dan Transparan*” yang diturunkan ke sasaran “*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*” yang selanjutnya di turunkan ke tujuan dan sasaran Kecamatan Karangrejo. Untuk memfokuskan program dan kegiatannya untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Karangrejo maka ditetapkan daftar sub-kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4.3
Daftar Sub-kegiatan Prioritas dalam mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN /SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas Kinerja kelurahan serta Kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan Sosial	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan // Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa // Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Mendukung tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan sasaran mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Lembaga Masyarakat serta aparatur desa di wilayah Kecamatan Karangrejo	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan // Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	

Uraian Sub Kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama

(IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktifitas rutin.

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Karangrejo dapat ditentukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. Berikut IKU Kecamatan Karangrejo yang berlaku dari tahun 2025 sampai dengan 2030.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangrejo

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	89	89	90,50	91	91,50	92	93	IKU
2	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Nilai	90,20	90,20	90,25	90,30	90,35	90,40	90,45	IKU
3	Nilai SAKIP	Nilai	89,45	89,45	89,50	89,55	89,60	89,65	89,70	IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Karangrejo dihitung dengan rumus sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Karangrejo	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ <p>9 parameter IKM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana 	Laporan SKM Kecamatan Karangrejo	Kecamatan Karangrejo
2.	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Karangrejo	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	<p>Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang di ambil dari 7 aspek penilaian meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegatif 4. Penyelenggaraan tugas atributif 5. Inovasi / kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian 	Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magetan	Kecamatan Karangrejo

			<p>6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan</p> <p>7. Pelaksanaan tugas lainnya</p>		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Karangrejo	Nilai SAKIP	<p>Nilai SAKIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi <p>Komponen Perencanaan yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan <p>Komponen Pengukuran yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 2. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien 	Inspektorat Daerah	Kecamatan Karangrejo

			<p>Komponen Pelaporan, yang di nilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap 3. LkjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya <p>Komponen Evaluasi, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindak lanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya 		
--	--	--	--	--	--

4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) .

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Karangrejo sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Karangrejo

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NIHIL									

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karangrejo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini, Renstra Kecamatan Karangrejo menyajikan agenda utama perencanaan program yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya.

Penyusunan Renstra Kecamatan Karangrejo dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program sekaligus menjaga focus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2025. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Kecamatan Karangrejo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Setiap seksi pada Kecamatan Karangrejo agar mendukung pencapaian target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh ASN pada setiap seksi di Kecamatan Karangrejo dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangrejo yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan maka penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan di tingkat Nasional dan atau daerah maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Karangrejo, 18 Desember 2025
CAMAT KARANGREJO

SECONDANY BUDI W, S.Sos, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 197011021990031002